

EKSISTENSI ORGANISASI ISLAM DI SULAWESI SELATAN: STUDI GERAKAN SOSIAL POLITIK FRONT PEMBELA ISLAM DI KOTA MAKASSAR

Annisa Nurdiassa¹, Gustiana Kambo², Muhammad³, Achmad Zulfikar⁴
Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin¹, Program Studi Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin², Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin³, Program Studi Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin⁴

Email: annisa.nurdiassa@ymail.com¹, gustianakambo@yahoo.com²,
alhamid.muhammad@gmail.com³, apa@kabarfikar.com⁴

Abstract

The Islamic Defenders Front is an Islamic organization that contributes to the democratic process in Indonesia after the New Order government. FPI was declared on August 17, 1998 by adhering to the principle of its movement, namely Amar Ma'ruf Nahi Munkar. This type of research is qualitative research with a case study approach. This study aims to find out how the typology of the movement of Islamic defenders fronts in Makassar, the theory used is the typology theory of social movements proposed by David Aberle, Cameron and Blumer as well as the theory of social movement by Charles Tilly. The results of the research indicate that the organization of Makassar Islamic Defenders Front viewed from the objectives of the movement and the methods used to achieve the objectives, the dimensions of change (who is changed) and the dimensions of change including typology category of social alternative movement category, and social redemptive movement. This movement also potentially transforms into political movements.

Keywords:

Islamic Organization; Islamic Defenders Front; Social Movement; Political Movement

Pendahuluan

Organisasi Islam telah menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya dalam proses kemerdekaan Indonesia, hingga terlibat dalam sistem politik Indonesia, serta berbagai sektor kehidupan masyarakat. Beberapa diantaranya seperti: Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Alasan yang melatarbelakangi berdirinya organisasi Islam di Indonesia, salah satunya untuk merespon keinginan umat Islam untuk lepas dari penjajahan, corak pergerakannya juga beragam mulai yang bercorak keagamaan, sosial dan politik. Dalam hal ini Weber menekankan pentingnya aspek agama dalam tindakan sosial¹. Jadi agama pada prinsipnya menjadi acuan bagi tindakan dan orientasi sikap dan perilaku masyarakat.

¹ Robert N. Bellah. 2000. "Beyond Belief: Essays on Religion in a post-Tradisionalist Word". Paramadina Mulya. Jakarta. h 121

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan berdemokrasi, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk umat Islam untuk berhimpun dan mendirikan organisasi berbasis keagamaan. Kehadiran organisasi tersebut mampu meningkatkan posisi tawar umat Islam. Namun demikian, di masa orde baru, wacana dan kebijakan terkait relasi agama dan politik yang berkembang adalah 'Indonesia itu bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokrasi'. Di dalam konsep tersebut, pengelolaan pemerintahan tidak didasarkan pada agama tertentu sebagaimana terjadi di negara-negara yang bercorak teokrasi, tetapi Indonesia juga tidak seperti negara sekuler yang memisahkan secara tajam antara agama dan negara (*separation of religion and state*)². Walau demikian, organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama tetap dapat mengambil peran dalam pemerintahan³. Sedangkan, Muhammadiyah lebih memilih mengembangkan amal usaha dengan meletakkan pilar kemandirian ekonomi sebagai ciri Persyarikatan dan ijtihad ini terus berlanjut dengan mengelola amal usaha dan mendirikan unit usaha. Hal ini menjadi posisi tawar yang diperhitungkan pemerintah.⁴

Pasca orde baru, ditandai dengan peristiwa reformasi 1998, demokratisasi di Indonesia menjadi semakin terbuka. Hal ini ditandai dengan maraknya perkembangan berbagai partai, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain sebagainya, di masa ini juga gerakan Islam menemukan momentum untuk melakukan akselerasi politik secara kultural (ormas dan organisasi Islam), maupun struktural (Parpol Islam). Politik kultural ditandai dengan kehadiran Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahlusunnah Waljama'ah (FKAWJ), Majelis Mujahidin, DI/NII, HT dan organisasi Islam lain sejenisnya yang merupakan gerakan dan partai yang berasaskan Islam dengan kesamaan tujuan dengan agenda untuk menegakkan syariat Islam atau menerapkan Islamisasi pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan FPI sebagai organisasi keagamaan menjalankan fungsi pengawasan, kontrol, saran serta kritik dalam rangka penegakan syari'at Islam demi kepentingan

² Kacung Marijan, "Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru" 2011. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 58

³ Nurlira Goncing. 2015. Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

⁴ Achmad Zulfikar dan Andi Azhar. 2018. *Persyarikatan Muhammadiyah Merespon Tantangan Dunia Kerja dan Kompetisi Global*. Diakses dari: <https://doi.org/10.31227/osf.io/5cavb>.

umat Islam⁵. Sehingga, dapat dipahami bahwa arah gerakan FPI dalam mendukung penegakan syari'at Islam sangat tinggi dengan melakukan pendekatan dengan metode perjuangan *amar maruf nahi mungkar* dan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah doktrin ideologi mereka yang beraliran *ahlul sunnah wal'jamaah*. Pasca reformasi FPI patut diperhitungkan. Organisasi ini didirikan untuk 'membela' harkat dan martabat umat Islam dan menegakkan syariat Islam melalui cara-cara yang dianggap konstitusional⁶. Selain itu bahwa ideologi FPI mengalami dualisme konsep yakni berdasarkan buku dasar AD/ART FPI dijelaskan bahwa Aswaja sebagai ideologinya. Sedangkan, berdasarkan pengakuan para *stakeholder* FPI bahwa ideologi Aswaja yang dijalankannya tidak sama dengan pemahaman umum (seperti NU dan Muhammadiyah)⁷.

Aswaja yang dipahami para aktifis FPI lebih mendekati pemahaman aswaja menurut kelompok salafi yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib di Yogyakarta. Menurut kelompok ini, Aswaja adalah mereka yang telah sepakat untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan al-hadist dan mereka itu adalah para sahabat dan tabi'in. Sehingga menurut kelompok ini, mengikuti jejak kaum *salafus shalih* harus dilakukan secara total, apa yang dipahami, dilakukan dan difatwakan oleh para sahabat yang tercermin dalam diri para pemimpin agama diikuti secara utuh dan apa adanya, tidak mengurangi dan juga tidak menambah. Hal ini meliputi bidang akidah, hukum, dan tingkah laku keseharian, seperti cara berpakaian, makan, minum, shalat. Dalam artian kelompok ini (FPI) berusaha menjaga otentisitas agama, sampai pada hal-hal yang sifatnya simbolik. Perbedaan atas ritus dan simbol dianggap sebagai penyimpangan ajaran agama. Dalam pemahaman kelompok ini, paham keagamaan para sahabat harus dipegang kuat karena Allah dan rasul-Nya banyak sekali memberi penjelasan tentang kemuliaan para sahabat, bahkan memujinya, seperti dalam QS. al-Fath:18, QS. al-Baqarah: 143, QS. al-Baqarah: 137. Mereka tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa asal mula Aswaja adalah dari Abu Hasan al-

⁵ Ari Febriansyah. 2017. Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar. Skripsi UIN Alauddin Makassar. h. 56

⁶ Jajang Jahroni. 2004. *Defending the majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003*. Studi Islamika 11 (2).

⁷ Fathorrahman dan Mujahra. 2017. Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI). *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1 (2).

Asy'ari dan Abu Mansur al-maturidi, seperti yang diungkapkan Achmad Masduq dalam bukunya Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah, yang menjadi acuan paham keislaman warga NU. Dalam buku ini Masduq memang menjelaskan bahwa faham Aswaja mengikuti madzhab al-Asy'ari dan al-Maturudi dalam bidang aqidah, mengikuti salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dalam bidang fiqh, mengikuti al-Ghazali dan Abu al-Qasim al-Junaidy dalam bidang tasawuf, dan mengikuti al-Bukhari dan Muslim dalam bidang hadist.⁸

Kehadiran FPI hingga kini menuai berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Di satu sisi, FPI dalam aksinya melibatkan unsur kekerasan seperti saat razia di tempat hiburan malam yang dianggap sebagai tempat maksiat, perjudian, minuman keras, demonstrasi dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, FPI juga menjalankan misi-misi sosial diantaranya: tanggap membantu korban bencana alam, serta aktif menyuarakan penolakan terhadap berbagai permasalahan yang dianggap merusak moral, nilai dan aqidah seperti penolakan, pengecaman dan penentangan keras terhadap pornografi dan pornoaksi.

FPI juga dianggap sebagai organisasi yang memiliki dua wajah antara sipil dan non-sipil dalam wacana dan praktiknya. Wajah sipil FPI digunakan untuk menunjukkan kredibilitas organisasi di ruang publik. Kehadiran FPI diperlihatkan sebagai sekutu otoritas penegak hukum dalam mengendalikan penyimpangan dan membantu mereka yang membutuhkan, terutama korban bencana alam. Wajah non-sipil digunakan dalam membangun dan mengelola basis pendukung yang melibatkan unsur kekerasan, konfrontasi, brutalitas dan terkadang membasmi mereka yang menyimpang. Namun demikian, ada satu wajah lagi yakni melibatkan anggota dan pendukung untuk melakukan kekerasan⁹.

Di Sulawesi Selatan, cabang FPI didirikan pada tahun 2007 dengan metode dakwah Dzikir, Taklim dan Tabligh. Sedangkan, FPI Makassar itu sendiri baru terbentuk pada tahun 2010. FPI Makassar memiliki slogan dan semboyan yang sangat melekat pada diri masing-masing anggotanya, yang berbunyi; "*Islam tersebar dengan Dakwah, Islam mulia dengan Hisbah dan Islam tegak dengan Pedang*". Slogan dan

⁸ Al-Zastrouw Ngatawi. 2013. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LkiS. h. 90

⁹ Mark Woodward dkk. 2014. *The Islamic defenders front: Demonization, violence and the state in Indonesia*. *Contemporary Islam* 8 (2).

semboyan tersebutlah yang menjadi salah satu karakteristik FPI dalam segala kegiatan maupun aksinya di tengah masyarakat, yang juga bisa dikatakan sebagai identitas mereka, hal ini pula yang menjadikan FPI berbeda dengan organisasi Islam yang lain, karena dalam pengakuannya FPI dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya lebih tegas dalam menegakkan *amar ma'ruf* dan tegas dalam memerangi *nahi munkar*. Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai organisasi berbasis keagamaan (Islam), dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI), maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tipologi gerakan Front Pembela Islam di kota Makassar.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjawab dan menganalisis tujuan penelitian diantaranya: Teori Perubahan Sosial, Pendekatan Gerakan Sosial, Tipologi Gerakan Sosial dan Gerakan Sosial ala Charles Tilly.

Teori Perubahan Sosial

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, baik itu berupa perubahan yang tidak mencolok/tidak menarik, maupun perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta adapula perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Para sosiolog melakukan klasifikasi antara masyarakat statis dan dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat-masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (*progress*) namun dapat pula berarti kemunduran dari bidang-bidang kehidupan tertentu.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat kebagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang berada di tempat lain. Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu, namun dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini perubahan-perubahan

tersebut berjalan dengan sangat cepat dan konstan, terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya yang berantai perubahan terlihat berlangsung terus, walau diselingi keadaan dimana masyarakat mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan.

Dalam hal ini perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Gillin dan Gillin, perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.¹⁰

Indonesia memang bukan negara agama, namun secara sosiologis agama menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam proses transformasi sosial yang terjadi di negeri ini, hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh nilai dan ajaran agama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga Agama menjadi aspek penting yang membawa pada perubahan sosial di Indonesia. Mengingat pentingnya peran agama dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia maka gerakan-gerakan Islam sangat menarik dan penting untuk dikaji. Di masa reformasi Indonesia menjadi momentum terjadinya perubahan sosial, serta arus balik dari kekuasaan negara ke kekuatan rakyat. Front Pembela Islam dalam hal ini secara sosiologis merupakan kelompok yang tergolong dalam masyarakat modern dan gaya hidupnya juga modern, akan tetapi jika dilihat dari gerakan dan pola pikirnya, FPI tampak konservatif karena sangat mengidealisasikan Islam, sehingga bagi mereka seluruh kehidupan ini harus tunduk pada dan sesuai dengan ajaran Islam yang tersurat dalam teks Al-Qur'an dan al-hadist.

¹⁰ Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. h. 113

Pendekatan Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan salah satu pokok bahasan dalam studi sosiologi yang sangat populer belakangan ini di negara-negara berkembang khususnya Indonesia, oleh karena muncul dan berkembangnya berbagai gerakan sosial baru (*new social movements*) dalam masyarakat dengan berbagai motif dan kepentingan, apakah gerakan sosial itu bermotif ekonomi politik ataupun bermotifkan ideologi tertentu dan/atau agama. Kadang-kadang muncul gerakan sosial dengan orientasi kegiatan dan aktivitas pada hal-hal yang spesifik dan kadang-kadang pula munculnya gerakan sosial yang dengan tegas mengkaitkan diri dengan kekuasaan dan politik kenegaraan. Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.

Sejumlah kenyataan bahwa suatu gerakan sosial selain memiliki bentuk gerakan yang melembaga juga merupakan gerakan yang terorganisasi, berkelanjutan dan tantangan kesadaran diri yang menunjukkan bagian identitas para pelakunya. Berbagai bentuk gerakan sosial yang muncul tidak hanya merupakan fenomena sosial semata, tetapi juga terkait dengan sejumlah doktrin dan paham-paham keagamaan. Berbagai bentuk gerakan revolusi, sekte-sekte atau gerakan keagamaan, organisasi politik, berbagai ragam kampanye, hingga ke gerakan sosial baru (*new sosial movement*) dengan basis-basis konsep aksi kolektif (*collective action*), perubahan sosial (*social change*), konflik sosial (*social conflict*) dan sebagainya.

Gerakan sosial Islam merupakan rangkaian pemanfaatan peluang kesempatan politik dalam rangka merestorasi sistem sosial, politik, budaya dan pembentukan ulang identitas umat Islam. Dengan menggunakan perspektif teori gerakan sosial kontemporer, kemunculan GSI sebagai bentuk pendekatan jalan tengah antara realitas sosial umat Islam dengan harapan-harapan ideal mengenai bentuk masyarakat yang dikehendaki. Kemunculan GSI di berbagai negara dapat dipandang dalam pendekatan struktural dengan fokus pada negara dan keterlibatan pihak asing yang membangkitkan

tindakan kolektif dan pilihan-pilihan rasional yang dipandang efektif untuk mempertahankan identitas sosialnya.¹¹

Tipologi Gerakan Sosial

Menurut David Aberle, Cameron, dan Blumer, para sosiolog mengelompokkan gerakan sosial kedalam beberapa tipe. Pengelompokan tipe gerakan sosial ini didasarkan atas berbagai aspek tujuan gerakan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan dimensi sasaran perubahan (*who is changed*) dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan (*how much changed*), maka gerakan sosial (*social movements*) dapat dikelompokkan kedalam empat tipe, sebagai berikut:

Tabel 1. Pengelompokan Tipe Gerakan Sosial

		How Much Change (Tingkat Perubahan)	
		<i>Limited</i> (Terbatas)	Radical
Who is Changed? (Sasaran Perubahan)	<i>Specific Individuals</i> (Khusus Individu)	<i>Alternatif Social Movement</i> (Gerakan Sosial Alternatif)	<i>Redemptive Social Movement</i> (Gerakan Sosial Pembebasan)
	<i>Everyone (Semua Orang)</i>	<i>Reformative Social Movement</i> (Gerakan Sosial Reformasi)	<i>Revolutionary Social Movement</i> (Gerakan Sosial Revolusi)

Sumber¹²

Gerakan sosial yang disesuaikan dengan orientasi dan isu yang diperjuangkan dapat terwujud dalam bentuk berikut; Pertama, gerakan transformasi (*transformative movements*) atau gerakan revolusi (*revolutionary movements*) yakni gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan secara total atau menyeluruh dalam struktur kehidupan masyarakat yang dipandang kritis atau tidak memuaskan seperti gerakan revolusi sosial dan gerakan keagamaan radikal. Kedua, gerakan reformasi (*revormative movements*) suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada sebaaian aspek struktur kehidupan masyarakat, seperti gerakan kaum perempuan anti-aborsi. Ketiga, gerakan penyelamatan (*redemptive movements*) yaitu gerakan yang bersifat total untuk penyelamatan manusia dari berbagai jalan kehidupan yang

¹¹ Syarifuddin Jurdi. 2013. Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan. *Jurnal Politik Profetik*, 1 (1).

¹² Oman Sukmana. 2016. *Konsepsi dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. h. 67

menyimpang, seperti pada umumnya gerakan-gerakan keagamaan, termasuk di dalamnya gerakan-gerakan sekte keagamaan. Keempat, gerakan alternatif (*alternative movements*) sebagai kebalikan dari gerakan penyelamatan, yaitu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada sebagian kehidupan individu anggotanya, seperti gerakan anti-alkohonisme atau untuk menyelamatkan para pecandu alkohol.¹³

Teori Gerakan Sosial Menurut Charles Tilly

Secara umum Tilly berpandangan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir (*organised*), berkelanjutan (*sustained*), menolak *self conscious* dan terdapat kesamaan identitas (*shared identity*) diantara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Selain itu Tilly juga menekankan mengenai pentingnya melihat gerakan sosial dalam konteks rentang sejarah atau dengan kata lain buat Tilly gerakan sosial memiliki latar belakang sejarah dan ini yang membedakan dengan tegas gerakan sosial dengan sejarah bentuk-bentuk aktivitas lainnya seperti kampanye pemilihan umum, perayaan hari pahlawan, peragaan kekuatan militer, maupun acara nasional lainnya. Jadi buat Tilly tidak semua bentuk aksi gerakan populer, aksi rakyat yang mengatasnamakan suatu hal dan semua orang dan organisasi yang mendukung hal-hal tersebut bisa disebut sebagai gerakan sosial. Charles Tilly dalam argumentasinya, selain memfokuskan pada organisasi sebagai sumber gerakan sosial, Tilly juga menghubungkan antara munculnya gerakan-gerakan sosial yang mengarah pada “proses politik” yang lebih luas, yang mencoba mengeksklusi berbagai kepentingan dengan berupaya mendapatkan akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan (*established polity*).

Perspektif teoritis tilly ini bisa dilihat dalam definisinya mengenai gerakan sosial sebagai sebuah “*sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of the which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands with public demonstration of support*” (rangkaian interaksi yang terjadi secara menerus antara pemegang kekuasaan dan orang-orang yang berhasil menciptakan klaim untuk berbicara atas nama konstituen yang dianggap tidak cukup terwakili secara formal. Orang-orang

¹³ Syarifuddin Jurdi. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia. h. 132

tersebut membuat tuntutan-tuntutan perubahan berupa distribusi kekuasaan yang dipublikasikan dan dibuat menjadi nyata, dan tuntutan-tuntutan tersebut ditopang pula oleh dukungan demonstrasi publik)¹⁴.

Analisa Gerakan sosial Front Pembela Islam dalam teori yang dikemukakan oleh Charles Tilly dianggap sesuai dengan gerakan FPI di Indonesia, secara khusus di Sulawesi Selatan (Makassar), dengan berbagai isu serta permasalahan yang menekan masyarakat dan dianggap melenceng dari koridor yang seharusnya dalam hal ini pandangan FPI tentang penegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam melindungi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. FPI mampu menunjukkan Gerakan Sosial yang dibentuk dari berbagai aksi dan tindakannya menjadi sebuah gerakan politik, dalam hal ini terlihat dari aksi bela Islam 411 dan 212 tahun 2016 yang berhasil mempengaruhi konstelasi politik Indonesia dengan ditetapkannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai penista agama terkait Surah Al-Maidah, dimana dalam teori Tilly juga menegaskan bahwa Gerakan sosial menjadi kendaraan oleh orang-orang atau kelompok untuk menunjukkan atau tampil di publik politik.

Gerakan Politik

Di Indonesia, gerakan sosial dimanifestasikan dalam berbagai bentuk gerakan, para aktor gerakan sosial merupakan orang-orang independen yang tidak terkait langsung dengan kekuasaan negara. Menjelang dan pasca Orde baru, gerakan sosial muncul dalam wujudnya yang sangat beragam, mulai dari gerakann petani, gerakan melawan negara, gerakan buruh, gerakan masyarakat sipil yang menuntut demokrasi hingga gerakan politik muncul dan menjamur di Indonesia. Gerakan politik merupakan gerakan sosial kemasyarakatan dibidang politik. Gerakan politik dapat berkisar di sekitar satu masalah atau dari rangkaian isu permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari kelompok sosial. Gerakan politik muncul sebagai reaksi dari sistem politik yang dipandang tidak memihak kepada rakyat hingga mereka melakukan gerakan yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dan ekspresi kepentingannya¹⁵.

Gerakan politik di kalangan umat Islam yang selalu mengambil prinsip-prinsip gerakannya pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena meyakini bahwa Islam

¹⁴ Bright, Charles dan Sandra Harding (Ed). 1984. *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*. Michigan: University of Michigan Press. h. 89

¹⁵ Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2013. "Pengantar Sosiologi Politik", Jakarta. PrenadaMedia Group. h. 69

merupakan sumber identitas dan sumber motivasi gerakannya. Suatu kekuatan politik disebut sebagai politik Islam apabila kekuatan politik tersebut mencantumkan dan menyertakan ketentuan legal-formal Islam dalam rumusan asas dan tujuannya.¹⁶ FPI dikatakan menjadi sebuah gerakan politik karena Gerakan politik muncul sebagai reaksi dari sistem politik yang dipandang tidak memihak kepada rakyat hingga mereka melakukan gerakan yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dan ekspresi kepentingannya. FPI pun juga demikian dalam beberapa peristiwa tertentu sebut saja gerakan aksi bela Islam 411 dan 212 yang terjadi tahun 2016. FPI mampu bergerak dan bergabung oleh sejumlah organisasi Islam di Indonesia dan seluruh umat Islam pada umumnya membentuk sebuah gerakan sosial besar-besaran yang tujuannya menekan pemerintah atas penangkapan Ahok (dalam hal ini sebagai penista agama) untuk ditangkap dan dipenjarakan. Keberhasilan dari aksi ini mampu menyentuh dan merubah kebijakan pemerintah yang memutuskan dan menetapkan Ahok sebagai tersangka penista Agama terkait surah Al-Maidah yang diungkapkannya dalam kampanye.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial Front Pembela Islam Makassar. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana tipe/tipologi gerakan Front Pembela Islam dilihat dari tujuan gerakan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan, dimensi sasaran perubahan (*who is changed*) dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan yang dibawa.

Library research atau studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini yakni cara pengumpulan data dengan melalui penelusuran buku, jurnal, surat kabar atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Selanjutnya, *Field research* atau studi lapangan digunakan untuk mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan.

¹⁶ Syarifuddin Jurdi. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia. h. 88

Penelitian kualitatif menempatkan informan sebagai bagian yang penting karena berhubungan dengan data dan kevalidan data tersebut, sehingga dibutuhkan ketepatan dalam pemilihan informan. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau sampel bertujuan dengan pemilihan *key person* nya juga disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun informan yang di pilih adalah sebagai berikut: Ketua DPW FPI kota Makassar (Ust. Agus Salim), Panglima Laskar Daerah (Ust. Abdul Rahman), Simpatisan FPI (Ghalib al Idrus), Tokoh Agama, (Ust. Muh syair HM), Akademisi (Dr. Adi Suryadi Culla), dan *Forum Group Discussion*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori- kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam aneka cara (observasi, wawancara. intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya "diproses" sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan Kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

Gerakan Islam di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan menjadi tonggak utama dalam meraih kemerdekaan, namun pergerakannya menjadi semakin luas dan besar di masa reformasi tahun 1998. FPI menjadi salah satu organisasi masyarakat berbasis keagamaan (Islam) yang lahir di masa reformasi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1998 dengan prinsip menegakkan *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*. Kehadiran gerakan Islam terjadi karena adanya ketidakadilan yang dialami umat Islam dan adanya gerakan-gerakan lokal dan global yang mengancam nilai-nilai akidah (keimanan) umat Islam. Upaya pembelaan umat Islam secara terorganisasi merupakan hal mendesak yang dilakukan karena globalisasi yang ada saat ini sudah menjelma menjadi penjajahan gaya baru, melalui upaya-upaya pemaksaan sistim politik, budaya dan sosial ke bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Upaya-upaya pengrusakan dari dalam umat

¹⁷ Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Reflika Aditama. h. 101

Islam sendiri perlu dihadapi dengan tegas, misalnya upaya pembiasaan makna pluralitas atau upaya liberalisasi ajaran Islam.

Pluralitas paham keagamaan merupakan suatu keniscayaan. Pluralitas paham keagamaan mewujud dalam banyak aliran atau mazhab di bidang politik, kalam, fiqh, filsafat, dan tasawuf. Secara teologis-normatif keniscayaan mengenai pluralitas paham telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Secara empirik, pluralitas juga sering kali menjadi pemicu konflik sosial yang melibatkan kelompok lintas agama dan paham keagamaan.¹⁸ Maka dari itu untuk menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan kesatuan negara, maka toleransi antar umat beragama sangat diperlukan agar bisa menjadi penengah dan solusi terbaik.

Dalam teori tipologi gerakan sosial, menurut Aberle, Cameron, dan Blumer, para sosiolog mengelompokkan gerakan sosial kedalam beberapa tipe. Pengelompokkan tipe gerakan sosial ini di dasarkan atas berbagai aspek tujuan gerakan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan dimensi sasaran perubahan (*who is changed*) dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan (*how much changed*), maka gerakan sosial (*social movements*) dapat dikelompokkan kedalam empat tipe. Pertama, gerakan transformasi (*transformative movements*) atau gerakan revolusi (*revolutionary movements*), gerakan reformasi (*revormative movements*), gerakan penyelamatan (*redemptive movements*) dan gerakan alternatif (*alternative movements*).¹⁹

Dari keempat tipologi gerakan sosial yang dijelaskan diatas, peneliti membahas semua tipologi gerakan sosial terkait korelasi teori tipologi gerakan sosial dengan gerakan front pembela Islam di makassar, namun dalam hal ini, peneliti melihat secara deskriptif dan didukung oleh hasil wawancara penelitian, maka gerakan front pembela Islam di Makassar termasuk dalam kategori gerakan sosial alternatif dan gerakan sosial penyelamatan. Berikut analisisnya.

Gerakan Sosial Revolusi

Gerakan sosial revolusi atau *revolutionary social movements* merupakan suatu tipe gerakan sosial yang paling keras (ekstrim) dibandingkan tipe gerakan sosial lainnya, berjuang untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat dengan basis

¹⁸ Biyanto. 2015. Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang umat, kewargaan, dan kepemimpinan non-muslim. Bandung. PT. Mizan Pustaka. h. 55

¹⁹ Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. h. 76

tujuan ideologinya ingin menggantikan nilai-nilai dan ideologi yang sudah ada secara fundamental, termasuk upaya menentang pemerintahan dan berusaha untuk menggulingkan otoritas yang sudah mapan dan apabila diperlukan bisa saja menggunakan kekerasan. Sasaran dan aspek perubahannya adalah melakukan transformasi total dari masyarakat, menghancurkan tatanan lama dan digantikan dengan tatanan yang baru.

Makassar menjadi salah satu kota dengan mayoritas penduduk muslim, data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2016 menunjukkan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dan Agama yang dianut di Provinsi Sulawesi Selatan, data penduduk kota Makassar yang beragama Islam menunjukkan jumlah yang lebih banyak dari pada penduduk yang beragama lain yaitu berjumlah 930.006, dengan data demikian maka memungkinkan adanya ruang bagi umat Islam untuk membentuk maupun mendirikan organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan, dengan demikian mampu menjadi salah satu alternatif untuk memiliki posisi tawar umat Islam. Posisi tawar yang dimaksud diterjemahkan dalam bentuk hak kolektif umat Islam yang lebih signifikan, antara lain hak umat Islam untuk memiliki lingkungan sosial yang bersih dari berbagai permasalahan yang dianggap merusak moral, nilai serta aqidah seperti pornografi, perjudian, narkoba termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan peraturan undang-undang atas dasar syariat Islam.

Gerakan untuk menerapkan Syari'ah Islam dalam semua lini bentuk pemerintahan dan pengambilan kebijakan di Indonesia tumbuh subur setelah reformasi bergulir. Kelompok-kelompok Islam mulai mewarnai kehidupan keagamaan, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Greg Fealy dan Anthony Bubalo menyebutkan bahwa Islamisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa Islam harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat, mulai dari pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan dan ekonomi. Islamisme merupakan upaya untuk menegaskan kembali pesan-pesan politik, sosial dan ekonomi yang diperjuangkan oleh kelompok Islam.

Front Pembela Islam Makassar adalah komunitas/kelompok yang melakukan gerakannya untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan yang dimaksud lebih mengutamakan solidaritas emosional, yang identik dengan identitas keagamaan, dalam hal ini adalah Agama Islam dan fokus gerakan FPI adalah menumpas kemaksiatan

(*Nahi Munkar*), hal ini sesuai dengan pemilihan nama kelompok, yaitu Front Pembela Islam. Kata *front* mengandung arti bahwa organisasi ini berusaha untuk selalu ada digaris terdepan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan, kemudian kata pembela mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berusaha berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak umat Islam, sedangkan kata Islam mencirikan bahwa perjuangan organisasi ini berlandaskan ajaran Islam yang dalam setiap gerakan aktivitasnya tidak lepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar.²⁰

Analisa Front pembela Islam terkait tipologi gerakan sosial revolusi jika dilihat dari basis tujuan ideologinya dapat dilihat bahwa organisasi front pembela Islam menginginkan NKRI yang bersyariah, dalam buku Dialog FPI Amar ma'ruf Nahi Munkar, dalam menjawab berbagai tuduhan terhadap gerakan nasional Anti maksiat di Indonesia Habib Rizieq Shihab menjelaskan, jika semua persoalan kemunkaran bermuara pada sistem, maka perjuangan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia terfokus pada perubahan sistem. "yaitu tegakkan Syariat Islam sebagai sistem bernegara, sehingga dengan sendirinya sistem tersebutlah yang memberangus segala kemunkaran yang ada."²¹ Pada dasarnya pemerintah telah mendukung penerapan syariat Islam di Indonesia Hal itu tercermin dari keterlibatan negara dalam mengatur ibadah haji, pernikahan, perceraian, masalah warisan, penentuan hari raya, kebebasan mengenakan hijab, hingga urusan waktu sholat. Dalam artian semboyan NKRI bersyariah tidak bertentangan.

Peneliti melihat terkait analisa diatas, bahwa front pembela islam tidak memiliki gerakan revolusi di kota makassar, namun Front Pembela Islam memiliki tujuan yang sifatnya revolusioner hal ini dibuktikan dengan adanya upaya untuk menerapkan Undang-undang yang mengadung ajaran syariah Islam, selain itu fokus penelitian ini adalah terhadap gerakan organisasi Front Pembela Islam, sehingga gerakan FPI belum dapat dikaitkan ataupun dikategorikan dalam gerakan sosial revolusi. Meskipun demikian, FPI juga tidak berupaya menentang pemerintah maupun berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berlangsung.

²⁰ Al-Zastrouw Ngatawi. 2013. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LkiS. h. 66

²¹ <https://www.todayonline.com/commentary/rise-indonesias-fpi-and-its-push-syariah-law>. Di unggah oleh Arifianto, Alexander R. diakses pada tanggal 10 April 2018, from Website Today Online

Di Makassar, organisasi Front Pembela Islam berada dalam hubungan yang baik dengan Walikota saat ini yaitu Danny Pomanto, terbukti dengan adanya pengawalan FPI terhadap beliau dalam pendaftaran calon Walikota (petahana) ke kantor KPU. Fakta ini menunjukkan bahwa front pembela Islam mendukung penuh demokratisasi di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh ketua DPW Front pembela Islam Makassar Ust, Agus salim dalam hasil wawancaranya menyatakan: "...terkait sistem yang ada sekarang, yaitu demokrasi, Front pembela Islam menganggap bahwa demokrasi menjadi wasilah untuk memilih pemimpin, sehingga Front Pembela Islam mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin muslim dan mendorong masyarakat (pemimpin) maju secara independen..."²² terkait hal ini FPI makassar memberikan klarifikasi terkait keikutsertaannya dalam pengawalan Pilwalkot Makassar dimana FPI menunjukkan dukungannya terhadap Danny Pomanto dengan mengawal rombongan Danny dalam pendaftaran di KPU beberapa waktu lalu; "...Ya betul saat itu kita melakukan pengawalan pilwalkot pada Pak Danny, terkait hal ini FPI mendorong Danny Pomanto untuk maju secara Independen, mengingat antara FPI dan Danny Pomanto memiliki kedekatan dan komitmen, dalam artian danny pomanto dianggap selama ini berada pada pihak umat Islam, dalam berbagai acara yang diadakan FPI, beliau selalu menyempatkan hadir bersilatullah, menerima dengan baik serta merespon dengan serius segala protes maupun aduan dari umat Islam, termasuk dalam membantu pembubaran 1000 lilin untuk Ahok di pantai Losari, pemberhentian pembangunan gereja yang tidak sesuai dan lain sebagainya, sehingga kemudian inilah yang dianggap sebagai komitmen FPI untuk mendorong Danny Pomanto maju secara independen dan bersama berjuang, InsyaAllah..."²³

Organisasi Front Pembela Islam, meskipun dalam hal ini berada pada ranah organisasi yang mendukung penerapan Syariah Islam, tetapi juga tetap menerima sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam menggunakan hak pilih, dan yang lebih penting adalah tidak ada upaya dari organisasi ini dalam menggulingkan/menjatuhkan pemerintah.

²² Wawancara peneliti dengan Ketua DPW FPI Kota Makassar Ust Agus Salim tanggal 14 April 2018

²³ Wawancara peneliti dengan Ketua DPW FPI Kota Makassar Ust Agus Salim tanggal 14 April 2018

Gerakan Sosial Reformasi

Gerakan sosial reformasi atau *reformative social movements* yaitu tipe gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang. Gerakan sosial reformasi, umumnya terjadi dalam suatu sistem politik. Tipe gerakan ini bisa bersifat progresif (mempromosikan pola sosial yang baru) dan bisa bersifat reaktif (*countermovements*) yang mencoba mempertahankan *status quo*) dengan basis tujuan ideologinya ditujukan untuk mengadakan perubahan agar nilai-nilai yang ada bisa diterapkan/diimplementasikan lebih kuat lagi, seperti mengoreksi atau memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul. Sedangkan sasaran dan aspek perubahannya adalah perubahan sikap masyarakat terhadap topik atau isu yang terbatas dan tidak ingin merubah atau mengganti pemerintah yang ada, misalnya gerakan perempuan dan hak-hak sipil atau *multiculturalism* yaitu sebuah gerakan politik dan pendidikan yang melakukan advokasi terhadap orang-orang dari seluruh ras dan etnis tentang persamaan ras (*racial equality*).

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dan beragam, dimana organisasi masyarakat (ormas) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia. Ormas-ormas tersebut mewakili berbagai kepentingan masing-masing kelompok masyarakat dalam interaksi sosial politik. Interaksi ormas-ormas sebagai wakil berbagai kepentingan akan menjadi salah satu indikator dan penentu berhasil atau tidaknya masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dan bekerja sama dalam perbedaan.

Organisasi masyarakat adalah bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik suatu masyarakat dan juga aktor dalam negara yang demokratis. Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia berkembang dari spektrum perbedaan-perbedaan yang amat luas: tradisi, agama, ideologi (liberalisme, sosial demokrasi, radikalisme, sosialisme), dan juga kelas (pemodal, ekonomi menengah, buruh dll).

Analisa organisasi masyarakat (Ormas) Islam yaitu Front pembela Islam terkait gerakan sosial reformasi dapat dilihat dari posisi FPI yang bersifat sebagai *civil society* yang membantu para penegak hukum secara aktif maupun pro-aktif melalui informasi, dukungan langsung, tekanan-tekanan (*pressure*) politis, tuntutan melalui jalur hukum,

serta melakukan advokasi dengan agenda agar hukum di negeri ini dijalankan dengan baik.

Kehadiran gerakan dari organisasi front pembela Islam dalam merespon berbagai isu-isu serta permasalahan yang terjadi, khususnya masalah penyimpangan aqidah umat tersebut dinilai mampu memanfaatkan ruang publik (*public sphere*) ditengah-tengah masyarakat, dengan membangun komunikasi politik maupun sebagai peggerak isu. Analisa peneliti terkait gerakan sosial reformasi belum dapat dikaitkan dengan gerakan front pembela Islam, karena Front Pembela Islam tercatat secara resmi sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki ruang lingkup terbatas, dalam hal ini meskipun FPI adalah sebuah kelompok kepentingan dalam sistem poliitik di Indonesia, namun sebagai ormas Islam tidak memiliki wewenang untuk melakukan maupun membentuk lembaga berbadan hukum yang menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga bisa mendapatkan akses untuk melakukan perubahan dalam sistem politik itu sendiri.

Gerakan Sosial Alternatif

Gerakan sosial alternatif atau *alternative social movements* yaitu gerakan sosial yang tingkat ancamannya terhadap *status quo* sangat kecil karena sasaran dari gerakan sosial ini adalah suatu perubahan yang terbatas terhadap hanya sebagian dari populasi, dengan basis tujuan ideologinya lebih memperhatikan adanya perubahan dari dalam masing-masing individu dengan cara melakukan renovasi atau pembaharuan nilai-nilai daripada memperhatikan perubahan kelembagaan, tujuan perubahannya adalah untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai cara hidup, sedangkan sasaran dan aspek perubahannya berupa perubahan pikiran dan perilaku spesifik tertentu beberapa orang. Sebagai contoh gerakan sosial *promise keepers*, yang ditujukan untuk mendorong agar laki-laki pemeluk kristen lebih taat dan lebih memperhatikan keluarga mereka.

Analisa gerakan sosial alternatif terkait gerakan front pembela Islam dapat dilihat dari sasaran perubahannya yang terbatas yakni hanya sebagian dari populasi, tujuannyapun adalah melakukan perubahan dari dalam masing-masing individu dengan cara melakukan renovasi maupun pembaharuan nilai-nilai, hal tersebut dapat ditemukan dalam gerakan keagamaan. Front pembela Islam itu sendiri dilihat dari konsep *civil society*, maka idealnya gerakan dari masyarakat sipil itu adalah sebuah gerakan moral

atau *moral force*. Gerakan moral yang dimaksud adalah dimana nilai-nilai keagamaan dapat menginspirasi sebuah gerakan untuk perubahan. Agama mengajarkan umat berjalan pada kebenaran, Kekeliruan harus diluruskan, kebohongan harus diungkap, kemaksiatan harus dimusnahkan dan lain sebagainya.

Ajaran yang berlandaskan Agama, dalam hal ini adalah agama Islam, dipegang teguh oleh organisasi front pembela Islam. Dengan prinsip *Amar ma'ruf Nahi munkar* front pembela Islam teguh mengajak kepada kebaikan dan tegas dalam memerangi kemaksiatan, mengingat maksiat dapat memberi pengaruh yang besar serta efek yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan individu.

Fiman Allah dalam surah Thaha ayat 121-127 yang artinya: “Dan Adam pun mendurhakai Rabb-nya, maka ia sesat. Kemudian Rabb-nya (Adam) memilihnya, maka Dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Allah berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariKu, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjukKu, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menggumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia: “Ya, Rabb-ku, mengapa Engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang bisa melihat”. Allah berfirman: “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari inipun kamu dilupakan”. Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal”.

Ayat ini menyebutkan beberapa dampak yang ditimbulkan karena perbuatan maksiat. Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa akibat yang ditimbulkan karena perbuatan maksiat adalah kesesatan yang merupakan sebuah kerusakan, konsekuensinya, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka ia mendapat azab baik didunia maupun di akhirat.

Pembiaran terhadap kemaksiatan seperti perjudian, perzinahan, dan maraknya tempat-tempat hiburan malam adalah sebuah kejahatan sosial yang berpotensi membuahkan berbagai bentuk penyakit masyarakat yang pada akhirnya akan merusak

berbagai sendi nilai-nilai moral dan bahkan akidah umat Islam, segala bentuk kejahatan sosial adalah ruang gerak yang menjadi prioritas Front Pembela Islam untuk dihadapi.

Sejak awal berdiri, FPI mengambil posisi *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kebajikan dan mencegah kemunkaran), ketika NU menyebar kebajikan melalui pondok pesantren dan Muhammadiyah bergerak disekolah Formal, belum ada yang mengisi ruang memerangi kemaksiatan. FPI melengkapi medan juang Islam dalam Memerangi Kemaksiatan sehingga bisa saling melengkapi. Terkait perjuangan dalam memerangi kemaksiatan Panglima Laskar Daerah FPI Makassar mengatakan sebagai berikut: "...istilahnya kita ini adalah perpanjangan tangan dari para habaib dan ulama, habaib dan ulama ada berapa di Indonesia, mana mungkin beliau-beliau yang turun langsung menumpas kemaksiatan, maka kita-kita inilah yang harus membantu dan berjuang melawan dan menumpas segala kemaksiatan di atas bumi ini, jangan sampai Allah SWT marah dan Murka karena tidak ada yang bisa menegakkan syariatnya, naudzubullahi mindzalik..."²⁴

Hasil analisa peneliti, melihat adanya korelasi antara gerakan sosial alternatif secara deskriptif dengan gerakan yang dilakukan Front Pembela Islam di Makassar. Prinsip dasar dalam gerakan Front Pembela Islam adalah *Amar ma'ruf Nahi munkar*, yang dapat kita artikan bahwa gerakan ini adalah sebuah gerakan keagamaan yang hadir ditengah masyarakat untuk mengajak, menyeru, memerintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat menguatkan iman dan Islam seseorang, serta segala kebaikan lainnya, hal ini terlihat dari berbagai kegiatan keumatan Front Pembela Islam seperti pengajian, dzikir bersama, tabligh, ta'lim dan menjalin interaksi dan hubungan baik dengan warga/masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan sosial seperti memberikan bantuan, aksi cepat tanggap dalam menangani korban bencana alam. Selain mengajak dalam kebaikan, gerakan Front Pembela Islam di Makassar juga tegas dalam mencegah berbagai macam kemunkaran, mengingat dampak dari pembiaran perbuatan kemaksiatan sangat besar dan dahyat, dan itu sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, diantara dalam surah Al Isra':16, Ibrahim: 7, Assyuro: 30, An-Nisa: 79, Ar-Rum:41, Al-An'am: 67 dan lain sebagainya.

²⁴ Wawancara peneliti dengan Panglima Laskar Daerah Ust. Abdul Rahman pada tanggal 07 April 2018

Gerakan Sosial Penyelamatan

Gerakan sosial penyelamatan atau *redemptive movements* yaitu gerakan sosial yang memiliki fokus selektif dan bersifat total untuk penyelamatan manusia dari berbagai jalan kehidupan yang menyimpang, serta ditujukan terhadap perubahan yang radikal (mengakar/mendasar) pada individu. Basis tujuan ideologinya adalah mencegah suatu perubahan dan mengeliminasi suatu perubahan sebelum dilembagakan. Tujuan dari perubahan gerakan ini adalah kembali ke tatanan nilai masa lalu, sedangkan sasaran dan aspek perubahannya berupa perubahan kehidupan beberapa orang melalui transformasi lengkap, seperti pada umumnya gerakan-gerakan keagamaan, termasuk di dalamnya gerakan-gerakan sekte keagamaan.

Front Pembela Islam dalam teori tipologi gerakan sosial yang sudah dijelaskan diatas, Front Pembela Islam cenderung termasuk kedalam kategori gerakan sosial penyelamatan (*redemptive social movements*) yaitu gerakan yang bersifat total untuk penyelamatan manusia dari berbagai jalan kehidupan yang menyimpang, seperti pada umumnya gerakan-gerakan keagamaan, termasuk di dalamnya gerakan-gerakan sekte keagamaan. Hal ini terlihat dari berbagai aksi FPI yang selama ini dikenal keras dan menentang terhadap segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran Agama Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

Gerakan penyelamatan yang dilakukan oleh FPI dalam implementasinya berupa gerakan *Nahi Munkar* yaitu gerakan yang mencegah masyarakat khususnya umat Islam dari perbuatan yang menyimpang dari ajaran Agama Islam seperti yang selama ini dilakukan oleh FPI makassar seperti melakukan razia-razia di tempat yang dianggap sebagai ladang maksiat, penolakan terhadap LGBT seperti pembubaran kontes waria, pornoaksi maupun pornografi, juga bahkan tidak ragu untuk menyerang dan mengepung markas Ahmadiyah maupun menentang keras terhadap kelompok Islam tertentu seperti Syiah.

Seperti yang dijelaskan oleh ketua DPW FPI Makassar ust. Agus Salim dalam wawancara sebagai berikut: "...FPI jelas sikapnya terhadap Syiah. Di makassar FPI sudah sering berdarah-darah dengan syiah. FPI pernah membubarkan syiah di BTN Antara saat mereka bedah buku, di manunggal dua kali, didarussakam 1 kali, di Unhas satu kali saat mau nikah mut'ah disana, kemudian di fajar saat Jalaluddin rahmat (Ketua Syiah yang juga anggota DPR dari partai PDI-P) mengajak mahasiswa menonton film

Karbala dengan versi mereka (syiah). Jalaluddin rahmat sampai dilarikan ke bandara pake mobil Ambulance. Mengenai Syiah Tidak ada riwayat kalo syiah yang tidak mau merebut kekuasaan, karena dalam istilah mereka itu ada wilayatul faqhi yaitu dimanapun mereka berada mereka harus berkuasa disitu, jadi bom syiah itu sebenarnya hanya menunggu saja waktu untuk meledak, makanya orang syiah itu dimana ada komunis mereka bersatu disitu, kejadian di syuriah kan seperti itu.” Syiah dari sudut pandang FPI itu terbagi tiga, ada yang gulu’, rofidhoh dan syiah zaidiyah. Gulu sudah jelas sesat dan menyesatkan, sudah kafir tidak ada tawaran lagi karena mereka menganggap bahwa seharusnya Ali yang menjadi nabi, Al-Qur’an seharusnya 40 juz kemudian menganggap derajatnya Ali bisa mencapai makamnya Allah. Rofidhoh juga sesat menyesatkan karena mencaci maki sahabat terutama Isa alaihissalam. Kemudian zaidiyah yang dekat dengan ahlussunnah Cuma mereka lebih dalam hal memuliakan sahabat mereka lebih ke Ali, tetapi tetap mencintai sahabat-sahabat yang lain...”²⁵

Mengenai sikap FPI terhadap Syiah lebih kepada ajaran mereka yang dianggap sesat dan menyesatkan seperti penghinaan terhadap para sahabat, Istri rasulullah dan lain sebagainya dalam dakwah dan pemahaman mereka, sehingga FPI tidak ragu untuk membubarkan acara Syiah jika kegiatan tersebut ketahuan dapat merusak Aqidah. Demikian halnya dengan pengepungan markaz Ahmadiyah di jalan Anoang. Ahmadiyah adalah organisasi Islam yang dianggap sesat karena menganggap bahwa Mirza Gukam Ahmad adalah Nabi Terakhir. Tidak haya FPI pemerintah juga tegas terhadap organisasi ini dengan melakukan pembekuan ataupun pembubaran organisasi Ahmadiyah. Hal ini adalah berupa penyelamatan aqidah dalam kehidupan masyarakat.

Adapun gerakan FPI lainnya terkait *Nahi Munkar* adalah Razia rumah kosan, penutupan rumah makan yang buka disaat Bulan suci Ramadhan, Pembubaran 1000 lilin untuk Ahok yang dilaksanakan di pantai Losari, serta demo-demo lainnya yang dilakukan tidak lepas dari stigma negatif masyarakat yang menganggap FPI sebagai organisasi intoleran, dan identik dengan kekerasan. Terkait hal ini Ust Agus Salim dalam wawancaranya menjelaskan sebagai berikut: “...sekarang kita lihat media yang menguasai siapa? Kan musuh Islam, Hari tanoe dia siapa, metro tv siapa yang belakangnya itukan Tommy winata yang punya (9 naga), makanya sebagian besar

²⁵ Al-Zastrouw Ngatawi. 2013. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LkiS. h. 65

media selalu menyudutkan Islam, terkait FPI di Makassar Media memang istilahnya lebih tertarik meliput saat FPI menggrebek, merazia dan kegiatan-kegiatan yang kami katakan *nahi munkar*, daripada meliput kegiatan-kegiatan kami yang termasuk Agenda Amar ma'ruf, karena sebenarnya disitulah kepentingan mereka..."

Merujuk dari semangat dan motivasi berdirinya FPI Makassar itu sendiri tidak lepas dari melihat bagaimana Agama itu dipermainkan, sehingga muncul keinginan untuk menjadi Front atau garda terdepan dalam membela Agama, dalam hal ini juga FPI melihat bahwa ormas-ormas yang ada hanya mengambil posisi *Amar Ma'ruf*, sementara belum ada ormas Islam yang tegas terhadap *Nahi Munkar*, sehingga Front pembela Islam tegas mengambil peran Nahi Munkar ditengah kehidupan masyarakat. Ada sebuah istilah yang diungkapkan Habib yaitu "silahkan kalian menanam padi, kami yang memberantas hama"²⁶

Gerakan yang dilakukan oleh FPI tidak hanya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat tetapi juga menjadi isu yang sangat menarik dan fenomenal karena gerakan kontroversinya, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menilai FPI adalah organisasi radikal fundamentalis. Mengenai Fundamentalisme, sebagian orang menggunakan istilah *Ushuliyun* untuk menyebut "orang-orang fundamentalis", yakni mereka yang berpegang pada fundamen-fundamen pokok Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kaitan ini, digunakan pula istilah *al-ushuliyah al-Islamiyah* (fundamentalism Islam) yang mengandung pengertian: kembali kepada fundamen-fundamen keimanan; penegakan kekuasaan politik ummah; dan pengukuhan dasar-dasar otoritas absah (*syar'iyah al-hukm*). Formulasi ini menekankan dimensi politik gerakan ketimbang aspek keagamaannya.

Beberapa uraian diatas menunjukkan bagaimana Istilah fundamentalisme dipahami masyarakat. Istilah tersebut, pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan membangun agama (Islam) dalam usaha merespon kemodernan. Namun karena untuk mencapai tujuan-tujuan itu tidak jarang di gunakan cara-cara radikal dan kekerasan, maka citra negatif melekat pada gerakan ini. Ekspos sisi negatif gerakan ini begitu luas dari media barat yang sarat dengan kepentingan politik memperkuat konotasi negatif terhadap gerakan fundamentalisme Islam. Dengan demikian, pada akhirnya gerakan

²⁶ Wawancara peneliti dengan Ketua DPW FPI Kota Makassar Ust Agus Salim tanggal 14 April 2018

fundamentalisme Islam diidentikkan dengan gerakan aktivis yang bermuatan negatif: kekerasan, radikal, terorisme, merendahkan martabat perempuan (dalam pandangan barat) dan sebagainya.

Secara faktual Front pembela Islam memang dapat digolongkan dalam kategori fundamentalis maupun radikal²⁷, khususnya dalam gerakan Nahi Munkar, namun menjadi sangat tidak cocok dan memadai (*compatible*), apabila teori ini di gunakan untuk menganalisis dan menjelaskan gerakan Front Pembela Islam, mengingat organisasi FPI disebutkan bahwa untuk melakukan Amar ma'ruf, gerakan ini menggunakan kebijaksanaan dan lemah lembut dengan langkah: Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal), Memberi *Mauizhoh Hasanah* (nasehat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik, sedangkan dalam menegakkan *nahi mungkar* FPI mengutamakan metode tegas dengan langkah: Menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu, Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan dan pena, Bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemunkaran.²⁸ Bukti lain yang bisa ditunjuk untuk menyatakan bahwa FPI bukanlah gerakan fundamentalis adalah dengan adanya kelonggaran dari tiap-tiap kelompok sosial yang menjadi bagian dari FPI yaitu empat kelompok sosial yang menjadi komponen dan basis konstruksi sosial FPI yakni para Habaib dan ulama, para intelektual/akademisi kampus dan mahasiswa, preman/anak jalanan, dan masyarakat awam. Meski FPI memiliki corak dan karakter pemahaman keislaman tertentu, hal itu tidak diterapkan secara ketat dalam komunitas mereka. Masing-masing kelompok sosial masyarakat tetap memiliki ruang teologi yang longgar dan fleksibel. Simbol-simbol keislaman FPI juga hanya digunakan sebagai perekat gerakan, bukan sebagai basis ideologi gerakan.²⁹ Bukti lain yang nyata dan konkrit terkait FPI bukanlah gerakan fundamentalis radikal adalah organisasi ini terbuka dan menerima demokratisasi di Indonesia. Berikut penjelasannya;

²⁷ Radikalisme dalam kajian ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. (Ismail Hasani dan Bonar Tigos Naipospos). Radikalisme dalam lingkup keagamaan merupakan gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan (Rubaidi)

²⁸ Al-Zastrouw Ngatawi. 2013. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LkiS. h. 68

²⁹ Al-Zastrouw Ngatawi. 2013. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LkiS. h. 142

Tabel 2. Sikap Politik Kelompok Islam Radikal

Kelompok	Syariah Komprehensif	Negara Islam	Khalifah	Demokrasi
DI/NII	Ya	Ya	Tidak	Tidak
JI	Ya	Ya	Ya	Tidak
MMI	Ya	Ya	Ya	Tidak
FPI	Ya	Tidak	Tidak	Ya
FKAWJ	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
HT	Ya	Ya	Ya	Tidak

Sumber: Fealy³⁰

Keterangan: DI= Darul Islam, FKAWJ= Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal Jamaah, FPI= Front Pembela Islam, HT= Hizbut Tahrir, JI= Jamaah Islamiyah, LJ= Laskar Jihad, MMI= Majelis Mujahidun Indonesia, NII= Negara Islam Indonesia.

Pada masa Orde Baru kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok kepentingan berasal dari kalangan Islam, kekuatan-kekuatan Islam yang memiliki basis kuat adalah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan organisasi keagamaan berbasis Islam terbesar di Indonesia. Diluar organisasi tersebut, serta organisasi-organisasi keagamaan lain yang sudah ada, muncul kelompok-kelompok Islam baru yang menguat ke permukaan setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Diantara kelompok-kelompok itu adalah DI/NII, JI, MMI, FPI, FKAWJ/LJ, dan HT. Kelompok demikian memiliki karakteristik yang serupa, yakni menyerukan diberlakukannya ajaran Islam kedalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia dianggap oleh kelompok ini karena tidak diterapkan syari'at Islam. Karena itu, kelompok-kelompok demikian sering disebut sebagai kelompok radikal.

Menurut Sydney Jones istilah radikal sendiri memiliki makna yang beragam. paling tidak, istilah radikal itu bisa merujuk pada lima kelompok yang ada di Indonesia. *Pertama* adalah kelompok yang ingin memasukkan piagam Jakarta ke dalam amandemen UUD 1945, termasuk didalamnya adalah partai-partai yang mengusulkan agar dimasukkan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam di dalam UUD. *Kedua* adalah kelompok yang memiliki visi Islam radikal, tapi menolak demokrasi sekaligus

³⁰ Kacung Marijan, "Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru" 2011. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 79

jalan kekerasan, termasuk didalam kelompok ini adalah Hizbut Tahrir. *Ketiga* adalah kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam sekaligus menggunakan kekerasan di dalam mempertahankan keyakinan. *keempat* adalah kelompok yang ingin berjihad untuk memerangi lawan-lawan Islam, termasuk menggunakan aksi terror. Sebagaimana yang digambarkan oleh Greg Fealy, kelompok-kelompok Islam yang tergolong radikal itu memiliki persamaan, meskipun diantara mereka juga terdapat perbedaan-perbedaan. Persamaan yang sangat menonjol adalah bahwa mereka sama-sama menghendaki diterapkannya syariah Islam secara komprehensif, hal ini tidak lepas dari cara pandang mereka bahwa Islam merupakan ajaran yang menyeluruh (*Kaffah*) yang menyangkut semua hal. Disamping itu permasalahan yang ada selama ini, khususnya krisis ekonomi, politik, dan moral berakar dari dilupakan dan dihindarinya penerapan syariah Islam. Alasan lainnya adalah, mereka (kelompok-kelompok Islam radikal) sama-sama menganggap organisasi-organisasi Islam yang sudah ada khususnya NU dan Muhammadiyah terlalu lemah di dalam memperjuangkan Islam. Karena itu kelompok-kelompok demikian pada dasarnya berusaha membangun kelompok '*beyond* NU dan Muhammadiyah'. Tetapi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut, diantara kelompok-kelompok radikal juga terdapat perbedaan-perbedaan. FPI dan FKAWJ misalnya berpendapat bahwa penerapan syariah Islam itu tidak harus berwujud dan berujung pada adanya negara Islam. Bagi kedua kelompok ini, ajaran Islam tidak mewajibkan berdirinya negara Islam, tetapi lebih pada implementasi syariah Islam. Sementara yang lain beranggapan tentang pentingnya negara Islam, hanya saja bagaimana wujud negara Islam itu diantara mereka juga berbeda. Darul Islam (DI) melihat bahwa negara Islam tidak harus berwujud adanya pemerintahan khalifah, sementara yang lain menghendaki adanya pemerintahan khalifah. *Terakhir*, di antara kelompok-kelompok radikal itu, hanya FPI yang mempercayai demokrasi, yang lainnya tidak menghendaki adanya pemerintahan secara demokratis, karena demokrasi dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Meskipun keenam organisasi Islam itu memiliki massa pendukung kecil, mereka sangat aktif memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. FPI misalnya aktif menyuarakan pentingnya penegakan hukum Islam, mereka aktif terlibat di dalam penggrebakan tempat-tempat maksiat. FKAWJ terlibat secara langsung konflik antar-agama di daerah-daerah konflik seperti di Maluku dan Sulawesi Tengah, mereka aktif

membantu kelompok Islam yang sedang berkonflik dengan kelompok Kristen di wilayah-wilayah itu. Semangat jihad sering dijadikan sebagai motivasi utama dari kelompok-kelompok Islam garis keras itu untuk menggerakkan aksi-aksinya. Sedangkan JI, merupakan organisasi bawah tanah yang sejumlah anggotanya terlibat aksi terorisme di sejumlah tempat di Asia tenggara.³¹

Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa Islam dewasa ini telah mewujudkan diri ke dalam sejarah. Kenyataan sejarah itu menjadi pandangan bahwa Islam adalah agama yang juga terkait erat dengan kenegaraan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika kaum Muslim sudah berkenalan dengan Aryanisme Persia, ada ungkapan populer yang berbunyi “*al-Islam din wa dawlah*”, bahwa Islam adalah agama dan negara. Perwujudan itu mengambil dua bentuk, yakni sebagai sistem keagamaan transendental yang ideal dan sebagai realitas sejarah. Adapun wujudnya yang pertama, Islam dicerminkan oleh ilmu-ilmu keIslaman sebagai hasil interpretasi para ulama dan cendekiawan atas Al Qur’an dan teladan Nabi Muhammad saw. Sebagai realitas sejarah, Islam dicerminkan oleh kebudayaan, peradaban, dan masyarakat Islam. Fenomena tersebut adalah bagian dari perwujudan Islam dalam dinamika politik.

Robert W. Hefner, dengan merujuk pada proposisi yang dikemukakan oleh Alexis De Tocqueville, agama bisa memegang peranan sentral dalam proses demokratisasi. Bahwa agama tidaklah harus dipisahkan dari politik. Bahkan yang diperlukan bukanlah *separation of religion and state*, tetapi suatu penolakan terhadap subordinasi agama kepada politik untuk kepentingan penguasa. Dalam proses demokratisasi, sumbangan agama paling efektif adalah ketika organisasi agama bergerak dari luar negara di wilayah yang disebut *civil society*. Dalam kondisi seperti ini, pasukan agamis menjadi bagian dari kontrol terhadap negara daripada menjadi bagian dari power elit, organisasi agama dalam masyarakat sipil membatasi kekuasaan negara dan memperkuat *balance of power* yang diperlukan untuk sebuah masyarakat sipil dalam kerangka demokrasi.³²

Front Pembela Islam Makassar menunjukkan eksistensinya sebagai ormas Islam yang tidak hanya mengajak pada *Amar ma'ruf* tetapi juga menunjukkan sikap tegas dan

³¹ Kacung Marijan, “Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru” 2011. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 99

³² Syahrir Karim. 2016. Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Politik Profetik*, 4 (2).

jelas terhadap *Nahi Munkar* khususnya dalam menumpas kemaksiatan dengan kata lain mengajak masyarakat untuk kembali kejalan yang benar, dengan meninggalkan berbagai macam sumber maksiat, seperti perjudian, minuman keras, perzinahaan dan perbuatan munkar lainnya yang dinilai merusak aqidah, nilai dan norma agama. Menurut Front Pembela Islam (FPI) Makassar mengutip dari Ali Bin Abi Thalib “*kerusakan itu bukan karena banyaknya maksiat, tetapi karena diamnya orang-orang baik*”, hal ini lah juga yang menjadi dasar gerakan nahi munkar organisasi ini.

Gerakan FPI dengan menegakkan *Amar ma'ruf Nahi Munkar* serta merta membawa dampak maupun perubahan ditengah kehidupan bermasyarakat, FPI yang berdiri di masa reformasi ini membawa perubahan transformasi sosial yang berkaitan dengan ideologi, dengan perubahan pergeseran aktor/elite, dimana Ulama menjadi tonggak utama dalam setiap gerakan. Front Pembela Islam dalam hal ini secara sosiologis merupakan kelompok yang tergolong dalam masyarakat modern dan gaya hidupnya juga modern, akan tetapi jika dilihat dari gerakan dan pola pikirnya, FPI tampak konservatif karena sangat mengidealisasikan Islam, sehingga bagi mereka seluruh kehidupan ini harus tunduk pada dan sesuai dengan ajaran Islam yang tersurat dalam teks Al-Qur'an dan al-hadist.

Gerakan Sosial Politik

Gerakan sosial dan khususnya gerakan sosial Islam, baik yang lahir sebelum kemerdekaan di Indonesia maupun pasca reformasi memiliki kepedulian yang sama, yaitu membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Dalam memperjuangkan dimensi masyarakat tersebut, gerakan sosial Islam, tidak bisa steril dari aspek-aspek politik dan bahkan gerakan-gerakan sosial Islam awal di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah “politik” Indonesia, meski tidak selalu dikaitkan secara langsung dengan aktivitas politik, karena memang gerakan sosial Islam bukanlah gerakan politik dan agama yang dipahaminya adalah bukan agama politik. Meskipun demikian kiprah dan peran-perannya dalam kehidupan kebangsaan telah memberikan warna politik, tanpa memperdebatkan kapasitas dan modal politik yang digunakan untuk terlibat dalam proses politik. Gerakan sosial biasanya berkembang

sesuai dengan kecenderungan orientasi pembangunan dan modernisasi dalam suatu negara.³³

Di Indonesia itu sendiri Eksistensi agama dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD sangat dihargai. Baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945. Dalam kehidupan keagamaan masyarakat di Indonesia banyak dijumpai organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan) yang didirikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) umumnya dan organisasi keagamaan pada khususnya di Indonesia didukung oleh konstitusi UUD 1945 dan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta aturan pelaksanaannya, PP No. 18 Tahun 1986. Pemerintah sangat mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan, yang melaluinya masyarakat dapat diikuti sertakan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebuah Organisasi Islam yang hadir ditengah masyarakat Indonesia dengan menawarkan berbagai solusi dalam kondisi krisis sosial politik yang terjadi saat itu, terlebih lagi dimasa reformasi organisasi dan kelompok Islam mendapat momentum yang tepat untuk melaksanakan gerakannya. FPI adalah Ormas Islam dengan gerakan sosial keagamaannya terlihat dari berbagai agenda dan kegiatannya yang secara aktif dilaksanakan, seperti pengajian, dakwah, dzikir, taklim dan tabligh. Salah satu partisipan FPI makassar yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menegaskan adanya aktivitas tersebut, "...Front Pembela Islam Makassar sebagai organisasi Islam dengan gerakan keagamaannya yang pertama adalah pengajian, secara rutin melakukan pengajian setiap Jum'at malam di rumah para anggotanya yang dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah setiap minggunya atau bahkan di sekretariat..."³⁴ Selain itu juga FPI aktif dalam gerakan sosial seperti penggalangan dana bagi korban bencana alam baik lokal maupun internasional serta penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan seperti bantuan untuk warga Palestina, syuriah dll, hal ini juga kembali di tegaskan oleh informan partisipan FPI sebagai berikut: "...salah satu yang menjadikan FPI tetap eksis hingga saat ini adalah

³³ Syarifuddin Jurdi. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia

³⁴ Wawancara dengan simpatisan FPI Kota Makassar Ghalib Alydrus pada tanggal 28 Agustus 2018

gerakannya dalam membantu korban kemanusiaan yang terjadi diberbagai belahan dunia khususnya negara-negara yang sedang mengalami konflik dan krisis kemanusiaan seperti di Palestina, karena kebetulan saat penggalangan dana tersebut saya ikut, tidak hanya itu, waktu banjir di BTP saja, FPI duluan yang turun langsung ke TKP, belum pi ada dari dinas sosial, padahal banjirnya cukup tinggi sampai pinggang orang dewasa...”³⁵ Ditempat terpisah, kegiatan FPI Makassar juga dijelaskan oleh Ust. Abdul Rahman sebagai berikut: “...Front Pembela Islam Makassar melakukan ta’lim rutin pekanan dan bulanan, pengajian, tarbiyah dan da’wah dengan bekerja sama dengan ormas Islam lainnya seperti dari jama’ah tabligh dan Wahdah Islamiyyah (WI), selain itu juga kami selalu tanggap dalam merespon dan membantu korban bencana alam, termasuk membantu korban bencana alam di Bima, FPI makassar saat itu mengutus/mengerahkan 16 anggotanya untuk terjun langsung melihat kondisi di Bima, membuat posko dan membawa bantuan, selain itu juga penggalangan dana bagi saudara muslim di Palestina dan Syiriah di beberapa titik jalan di kota Makassar, pembagian daging Qurban kepada masyarakat saat Idul Fitri maupun Idul Adha...”³⁶

Gerakan sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait gerakan sosial yang dipelopori oleh Front Pembela Islam yaitu Aksi bela Islam 212 dan 411 termasuk dalam gerakan sosial baru (*New Social Movements*). Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Gerakan sosial baru ini berkembang menjadi gerakan yang sangat dinamis terutama dengan timbulnya pergolakan di negara-negara Eropa Timur yang ingin melepaskan diri dari otoritarianisme menuju demokrasi. Charles Tilly menjelaskan gerakan sosial baru (*New Social Movements*) muncul disebabkan fokus tunggal mereka melebar menjadi isu reproduksi, seperti produksi budaya, symbol, dan identitas sosial. Dengan kata lain, gerakan sosial dewasa ini mengesampingkan hubungan instrumental terhadap negara dan memfokuskan kepada sebuah aksi kolektif, dimana ideologi dan identitas individu adalah sebuah kesatuan gerakan. Dalam hal ini terkait kasus Aksi Bela Islam 411 yang beruntun sampai aksi 212 mengenai protes sebagian masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim yang mengecam tindakan atau perlakuan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuku Tjahya Purnama (Ahok) yang dianggap melecehkan/menistakan Al-Qur’an Surah Al-maidah ayat 51 dalam kampanyenya beberapa lalu.

³⁵ Wawancara dengan simpatisan FPI Kota Makassar Ghalib Alydrus pada tanggal 28 Agustus 2018

³⁶ Wawancara peneliti dengan Panglima Laskar Daerah Ust. Abdul Rahman pada tanggal 07 April 2018

Gerakan sosial tersebut telah mempengaruhi konstelasi politik Indonesia dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka atas kasus penistaan Agama. Dengan kata lain, gerakan sosial tidak hanya menjadi alternatif terhadap sistem perwakilan politik yang terlembaga tetapi juga menjadi sebuah saluran yang tidak bisa dihindari dari hubungan antara negara dan warga negara. Sistem perwakilan politik dan gerakan sosial adalah dua sisi mata uang dalam konteks hubungan negara dan warga negara. Bahkan di negara-negara dimana proses demokratisasi tidak berkembang dengan baik, gerakan sosial menjadi alternatif utama warga negara menyuarkan kehendak dan kepentingannya.

Lebih lanjut Charles Tilly dalam argumentasi, selain memfokuskan pada organisasi sebagai sumber gerakan sosial, Tilly juga menghubungkan antara munculnya gerakan-gerakan sosial yang mengarah pada “proses politik” yang lebih luas, yang mencoba mengeksklusi berbagai kepentingan dengan berupaya mendapatkan akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan. Terkait hal ini gerakan sosial Aksi bela Islam 212 dan 411 mengarah pada proses politik jika dikaitkan dengan Pilkada DKI.

“...Gerakan 212 bisa dipandang sebagai gerakan politik dalam pengertian kekuatan sosial, sebagai sebuah bentuk *social movement* sebenarnya, mereka bereaksi terhadap isu, *social movement* itu yang menjadi kekuatan politik juga, jadi bukan dalam konteks politik praktis, tetapi dalam konteks protes (gerakan protes sosial) itu yg menjadi ciri aksi bela islam 212, ada basis moral (penistaan ahok atas surah Al-Maidah) yang menjadi dasar gerakan mereka dalam melakukan reaksi atau respon, Almaidah kan dijadikan sebagai penekanan untuk menilai gerakan itu. Persoalannya dengan kepentingan politik pilkada, kemungkinan *social movement* mengalami transformasi gerakan politik praktis juga, jadi jangan dianggap bahwa dia merupakan gerakan sosial lalu dia secara permanent mempertahankan gerakan itu, karena bisa saja ciri itu berubah dalam isu yang berbeda mereka melakukan pemihakan terhadap kontetstan politik, mereka sudah masuk dalam politik praktis, Jadi ciri dari sosial movementsnya sebagai gerakan moral itu nda relevan lagi kita bicarakan, kemungkinana gerakan 212 masuk

kedalam persoalan politik praktis apalagi dukung mendukung calon presiden dll...”³⁷ Kelompok-kelompok Islam seperti ini menyadari perlunya strategi membangun dukungan politik dari para politikus dan penguasa. Itu bisa dilihat dari pada pilpres 2009, dimana FPI dan forum umat Islam menyatakan mendukung JK-Wiranto. Kemudian pada Pemilihan Umum 2014, tercatat sejumlah partai politik menunjukkan keinginannya membentuk aliansi dengan FPI³⁸. Pengecualian untuk PDI-P dan kandidat Presidennya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Keterlibatan FPI dalam politik berlanjut pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dimana FPI mendukung pasangan cagub-cawagub asal bukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Terkait hal ini Ketua DPW FPI Makassar menjawab sebagai berikut: “...Dampak dari aksi kemarin kan salah satunya adalah Anies yang maju jadi Gubernur, itu sebuah kesyukuran bagi kami, ya kalau bisa yang jadi pemimpin itu harus dari umat Islam...”³⁹

Penjelasan di atas mengenai bagaimana gerakan sosial mampu menjadi sebuah gerakan politik ketika sekelompok massa yakin bahwa sesuatu yang diterima itu baik dan benar dalam proses kognitif maka setiap bentuk perilaku yang muncul bukanlah hasil ramalan (*guess*), melainkan hasil pemikiran yang komprehensif. Oleh sebab itu, bila kemudian hasil pemikiran itu akan melahirkan aksi sosial atau tindakan sosial berdasarkan keyakinan yang telah terbentuk yang disebut sebagai keyakinan politiknya. Demikian halnya dengan gerakan politik di kalangan umat Islam yang selalu mengambil prinsip-prinsip gerakannya pada Al-Qur'an dan Sunnah, karena meyakini bahwa Islam merupakan sumber identitas dan sumber motivasi gerakannya. Suatu kekuatan politik disebut sebagai politik Islam apabila kekuatan politik tersebut mencantumkan dan menyertakan ketentuan legal-formal Islam dalam rumusan asas dan tujuannya.⁴⁰

Namun demikian, sangat disayangkan ajang Pilkada Jakarta telah menjadi ajang kontestasi kelas minoritas yang menjadi objek ideologi dari mayoritas. Seperti FPI yang merupakan salah satu subjek dominasi yang berdiri paling depan untuk memaksa agar minoritas Kristen Jakarta tunduk pada kehendak mayoritas. Dengan dasar bahwa

³⁷ Wawancara peneliti dengan Dr. Adi Suryadi, akademisi dan pengamat masyarakat sipil tanggal 22 Oktober 2018

³⁸ Ian Wilson. 2014. *Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia's 2014 Elections*. *ISEAS Perspective*, 24 Feb 2014

³⁹ Wawancara peneliti dengan Ketua DPW FPI Kota Makassar Ust Agus Salim tanggal 14 April 2018

⁴⁰ Syarifuddin Jurdi. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia

definisi mayoritas merujuk pada statistik agama. Sehingga, situasi ini dapat kita pahami sebagai upaya dari kuasa mayoritas untuk menghegemoni struktur, pikiran dan perilaku politik masyarakat. Ruang publik bahkan terdeterminasi oleh sistem simbolik dan doktrin agama yang berusaha membangun propaganda berbasis solidaritas mayoritas.⁴¹

Kesimpulan

Pasca reformasi 1998, demokratisasi di Indonesia menjadi semakin terbuka hal ini ditandai dan diwarnai dengan maraknya perkembangan berbagai partai, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain sebagainya termasuk didalamnya Organisasi (gerakan) Islam, Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu organisasi Islam yang turut menanggapi gelombang demokratisasi di Indonesia, FPI hadir dan muncul ditengan masyarakat Indonesia sebagai reaksi dan respon terhadap kondisi sosial politik di Indonesia saat itu yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. FPI di deklarasikan pada tanggal 17 agustus 1998 oleh sejumlah Ustadz, Kyai, dan Ulama di Pesantren al-Umm, Ciputat Tangerang. Dengan tujuan menegakkan *Amar ma'ruf Nahi munkar* (memerintahakan kebaikan dan mencegah kemungkaran). FPI dalam eksistensinya hingga kini menuai berbagai kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia, ada yang mendukung adapula yang menolak akan keberadaan organisasi Front Pembela Islam. Meskipun demikian FPI mampu menunjukkan eksistensinya dengan berbagai kegiatan, gerakan dan aksinya. FPI pun telah melebarkan sayap organisasinya, terbukti dengan adanya organisasi Front Pembela Islam FPI tidak hanya berada di daerah Jabodetabek tetapi juga menyebar diberbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan sudah berjalan sepuluh tahun, sejak didirikan pada tahun 2007 dengan metode dakwah, dzikir, taklim dan tabligh. Sedangkan FPI Makassar itu sendiri baru terbentuk pada tahun 2010. Pada tahun awal berdirinya FPI Sulawesi Selatan untuk ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) diamanahkan kepada Habib Mahmud Alhamid, dan dilanjutkan oleh Habib M. Reza Alhamid dideklarasikan di Mesjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar oleh ketua

⁴¹ Endang Sari. 2016. Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2 (2).

umum Habib M. Rizieq Shihab (Dewan Pimpinan Pusat), sedangkan untuk ketua DPD Sulawesi Selatan periode sekarang adalah Habib Muhsin Al-Habsyi, dan untuk ketua DPW (Kota Makassar, sejak awal berdirinya FPI Makassar) dipimpin oleh Ust. Agus Salim, dengan tujuan yang sama yaitu menegakkan “*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*”.

Gerakan Front Pembela Islam Makassar termasuk dalam kategori gerakan sosial alternatif (*alternative social movements*) dan gerakan sosial penyelamatan (*redemptive social movements*), maksud dari gerakan tersebut adalah ajakan terhadap seseorang untuk kembali kepada ajaran-ajaran kebenaran dalam hal ini Al-Qur'an dan As-Sunnah serta gerakan penyelamatan umat manusia terhadap berbagai jenis kemunkaran (kemaksiatan) yang dianggap sebagai penyakit masyarakat karena bisa merusak nilai-nilai dan norma Agama serta Aqidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Alexander R. Diakses tanggal 10 April 2018, dari Website Today Online: <https://www.todayonline.com/commentary/rise-indonesias-fpi-and-its-push-syariah-law>.
- Bellah, Robert N. (2000). *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Tradisionalist World*. Jakarta: Paramadina Mulya.
- Biyanto. 2015. Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang umat, kewargaan, dan kepemimpinan non-muslim. Bandung. PT. Mizan Pustaka.
- Bright, Charles dan Sandra Harding (Ed). (1984). *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*. Michigan: University of Michigan Press.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2013. “Pengantar Sosiologi Politik”, Jakarta. Prenada Media Group.
- Fathorrahman dan Mujahra. (2017). Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI). *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1 (2).
- Goncing, Nurlira. (2015). Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1 (1).
- Ismail, Ari Febriansyah. (2017). Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar. Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Jahroni, Jajang. 2004. Defending the majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003. *Studi Islamika* 11 (2).
- Jurdi, Syarifuddin. (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia.
- Jurdi, Syarifuddin. (2013). Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan. *Jurnal Politik Profetik*, 1 (1).

- Karim, Syahrir. (2016). Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Politik Profetik*, 4 (2).
- Marijan, Kacung. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ngatawi, Al-Zastrouw. (2013). *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LkiS.
- Sari, Endang. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2 (2).
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Wilson, Ian. (2014). Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia's 2014 Elections. *ISEAS Perspective*, 24 Feb 2014.
- Woodward, Mark dkk. (2014). The Islamic defenders front: Demonization, violence and the state in Indonesia. *Contemporary Islam* 8 (2).